KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Wakil Ketua DPR RI: Potensi Ekonomi Eurasia dan Asean Tidak Tertandingi
Tanggal : Kamis, 28 April 2016
Surat Kabar : Koran Tempo
Halaman : 3

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

WAKIL KETUA DPR RI: POTENSI EKONOMI EURASIA DAN ASEAN TIDAK TERTANDINGI

MASYARAKAT
Ekonomi yang membentang dari Jakarta sampai ke St. Petersburg memiliki potensi yang besar.

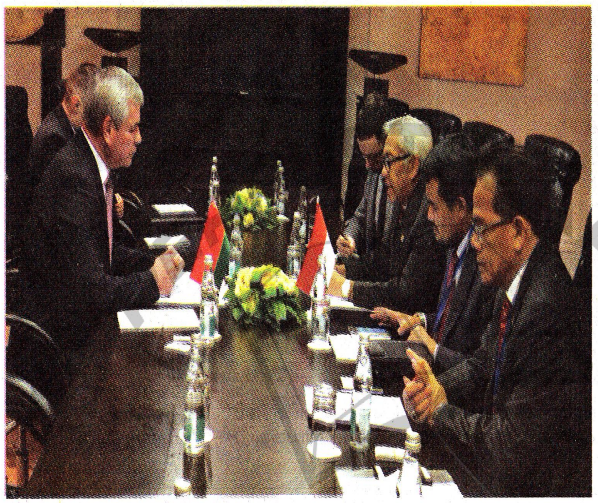
Delegasi Indonesia Pertemuan Bilateral dengan delegasi Belarus.

Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto (Fraksi Partai Demokrat) memimpin delegasi menghadiri The First Meeting of the Speakers of Eurasian Countries' Parliament pada 19-20 April 2016 di Moskow, Rusia. Agus Hermanto didampingi Rofi Munawar, Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) dari Fraksi PKS dan Yosef Umar Hadi, anggota BKSAP (Fraksi PDIP).

Pertemuan yang diprakarsai The State Duma of the Russian Federation dan The Parliament of the Republic of Korea ini dihadiri 19 perwakilan parlemen di antaranya dari Cina, Iran, Mongolia, Thailand, Vietnam, Kamboja, Pakistan, Afganistan, Belarusia, dan Republik Cek. Ketua Parlemen Rusia Sergey Naryshkin dan Ketua Parlemen Korea Selatan Chung Ui-hwa yang memimpin pertemuan, untuk beberapa saat mengajak semua delegasi melakukan *moment of silence* (mengheningkan cipta) bagi para korban ledakan bom bunuh diri di Kantor National Directorate of Security (NDS), dekat kompleks Kedutaan Amerika Serikat di Afganistan, yang menewaskan 28 orang dan melukai 320 orang lainnya, pada 19 April.

Dalam sambutannya, Agus Hermanto—legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah I—mencetuskan ide penguatan kerja sama antarparlemen Eurasia dan ASEAN pasca-penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan Eurasian Economic Union (EEU). Masyarakat Ekonomi yang membentang dari Jakarta sampai ke St. Petersburg mungkin tidak tertandingi, baik secara ukuran maupun potensi.

Di sela-sela pertemuan, Wakil Ketua DPR RI mengadakan pertemuan bilateral dengan perwakilan parlemen Belarus, yang membahas penguatan kerja sama di bidang perdagangan dan alutsista. Belarus juga mengusulkan agar Indonesia memiliki kantor perwakilan di Minsk dan peningkatan kerja sama *sister cities* dengan berbagai daerah di Indonesia. Adapun Yosef Umar Hadi menyampaikan kerja sama pariwisata dan timbal balik *visa-on-arrival* (VOA). Indonesia telah memberikan VOA kepada warga negara Belarus sejak September 2015.

Pemimpin parlemen negara-negara di kawasan Eurasia menyatakan perkembangan integrasi kawasan selayaknya tidak mengarah pada kompetisi, tapi menjadi peluang untuk lingkup integrasi yang lebih luas. "Pertemuan ini membahas peningkatan kerja sama antara Asia dan Eropa, terutama di bidang ekonomi, budaya, lingkungan, dan kemitraan strategis," kata Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Rofi Munawar.

Rofi menjelaskan, melalui MSEAP, parlemen dapat memberi dukungan terhadap inisiatif konektivitas antarnegara di kawasan Eurasia, misalnya Silk Road Economic Belt, Trans-Siberian Highway, dan Kazakhstan Silk Road Superhighway. "Tentunya kerja sama Pan Eurasia yang dibentuk melalui MSEAP tidak mengarah pada kerja sama eksklusif transkontinental dan ambisi geopolitik tertentu, tapi untuk melengkapi kerja sama multilateral yang telah terbangun selama ini," ujarnya.

Terkait dengan ledakan bom di Afganistan, Agus Hermanto yang juga menjabat Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Perdagangan (Korinbang) ini menyebutkan penanggulangan terorisme yang menjadi ancaman masyarakat International abad ini harus menyeluruh. Solusi terbaik mencakup pembentukan legislasi yang komprehensif, promosi multikulturalisme, dialog antarsivilisasi, dan program deradikalisasi.

Selain itu, Rofi Munawar menyatakan tindakan terorisme merupakan musuh bersama. Legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VII ini menegaskan, segala tindakan yang bertujuan menimbulkan teror dan mengancam keselamatan atau mengakibatkan kehilangan merupakan kejahatan kemanusiaan. Dan tindakan ini tidak dapat dikaitkan dengan agama, kepercayaan, ras, dan kebangsaan tertentu. ●INFORIAL

DPR-RI